

IMPLEMENTASI SENTRALISASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH DI KOTA MAGELANG

THE IMPLEMENTATION CENTRALIZATION OF FINANCIAL MANAGEMENT OF MUHAMMADIYAH ELEMENTERY SCHOOL IN MAGELANG CITY

Oleh: Dinda Indah Rachmawati Ansori, Prodi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, gadisutara23@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi sentralisasi manajemen pembiayaan dan dampaknya di sekolah binaan PDM Kota Magelang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subyeknya adalah PDM, kepala dan bendaharawan sekolah. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data menggunakan model induktif-interaktif. Hasilnya menunjukkan pertama kegiatan manajemen pembiayaan terdiri 1) penyusunan anggaran berbentuk APBS yang disusun oleh sekolah dan disahkan oleh PDM, 2) pembukuan berupa kas umum, pembantu kas, pembantu pajak, dan pembantu bank serta dibantu oleh PDM berupa penyimpanan uang, dan 3) pemeriksaan dilakukan oleh Kepala Sekolah menggunakan pembukuan bendaharawan sedangkan PDM dan Dinas Pendidikan/Kemenag memeriksa laporan triwulan. Kedua, sekolah pemberi subsidi, sekolah yang tidak menerima dan tidak memberi subsidi merasakan dampak positif berupa talangan BOS dan transparansi dana serta dampak negatif berupa birokrasi rumit. Sedangkan penerima subsidi cenderung merasakan dampak positif yaitu mendapatkan subsidi operasional sekolah dan kontrol keuangan.

Kata Kunci: *Manajemen Pembiayaan, Sentralisasi, SD Muhammadiyah*

Abstract

This research aims to describe the centralization of financial management and the impact for schools which are developed by the Regional Executive of Muhammadiyah Kota Magelang. This research uses quantitative approach focus on case study method. The subject of the research is the school principal and treasurer. The technique of collecting data through interviews, documentation, and observation. The data validity test uses triangulation sources. The data analysis uses inductive-interactive model. The result of the research indicates that, first, the financial management activity composed of 1) The arrangement of finance formed APBS, which is arranged by the school and agreed by Dikdasmen council in the form of APBS validity 2) The book-keeping in the form of general cash book, cash assistant book, tax assistant book, bank assistant book, and school financial management, which is helped by Dikdasmen council in the form of saving school fund, and 3) The controlling is done by the principal towards the book-keeping, which is done by the school's treasurer, whereas, Dikdasmen council and Educational department of Magelang City investigates the quarterly report. Second, the school, which gives a subsidy and the school, which does not receive nor give the subsidy feels the positive impact having a form a reserve cash of BOS and fund transparency with the negative impact of complicated bureaucracy. Whereas, The school, which receive the subsidy disposed to feel the positive impact that is getting a subsidy for school operational and controlling the fund of Dikdasmen council.

Keywords: *Financial Management, Centralization, Muhammadiyah Elementary School*

PENDAHULUAN

Salah satu unsur yang cukup penting dalam pengembangan pendidikan di sekolah adalah manajemen pembiayaan. Menurut Muljani A. Nurhadi (2011) biaya pendidikan merupakan nilai rupiah dari seluruh pengeluaran dalam

bentuk natura maupun uang yang digunakan untuk kegiatan pendidikan. Sedangkan manajemen pembiayaan adalah kegiatan pengaturan biaya atau kegiatan yang mengatur seluruh pengeluaran baik dalam bentuk natura maupun uang yang digunakan untuk kegiatan yang dinominalkan dalam rupiah. Manajemen pembiayaan yang baik dan sesuai

akan berpengaruh terhadap proses pengembangan pendidikan di sekolah.

Sebaliknya, manajemen pembiayaan yang kurang sesuai akan berdampak negatif terhadap pengembangan sekolah. Salah satu pola manajemen pembiayaan tersebut adalah sentralisasi dan desentralisasi.

Pola sentralisasi pembiayaan merupakan pola pengelolaan pembiayaan yang dipusatkan pada tingkat pusat. Pola desentralisasi pembiayaan merupakan penyerahan wewenang pengelolaan pembiayaan kepada otonomi pendidikan untuk dapat mengelola pembiayaannya sendiri.

Pola manajemen pembiayaan tersebut dapat dicermati pada institusi negeri maupun swasta. Sekolah negeri menerapkan pola pembiayaan desentralisasi dengan mengacu pada undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bagi sekolah swasta pengelolaan pembiayaan menjadi hak prerogatif bagi yayasan yang mampu institusi tersebut. Setiap yayasan memiliki kekhasan dalam mengelola dana yang ada.

Salah satu yayasan yang menjadi mitra pemerintah dalam membangun pendidikan di Indonesia adalah Muhammadiyah. Saat ini Muhammadiyah telah memiliki 4.623 TK/TPQ, 2.604 SD/MI, 1.772 SMP/MTs, 1.143 SMA/MA/SMK, 67 pondok pesantren, dan 172 perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggunakan pola desentralisasi dalam mengelola lembaga pendidikannya. Pola desentralisasi yaitu pemberian kewenangan kepada masing-masing Pimpinan Daerah Muhammadiyah di setiap Kabupaten/Kota untuk menyusun strategi pengembangan pendidikan. Melalui pola desentralisasi tersebut, masing-masing pimpinan daerah dapat menerapkan strategi yang berbeda yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang adalah salah satu Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang mengambil kewenangan

otonomi tersebut. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang saat ini memiliki tujuh Sekolah Dasar dan Menengah di bawah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu:

No	Nama Sekolah
1	SD Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang
2	SD Muhammadiyah 2 Kota Magelang
3	MI Muhammadiyah Terpadu Kota Magelang
4	SMP Muhammadiyah Kota Magelang
5	SMA Muhammadiyah 1 Kota Magelang
6	SMA Muhammadiyah 2 Kota Magelang
7	SMK Muhammadiyah Kota Magelang

Dari ketujuh sekolah Muhammadiyah di atas masing-masing memiliki kondisi yang berbeda, baik dari kondisi fisik sekolah, jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah siswa, hingga status yang dimiliki oleh sekolah.

Strategi yang digunakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang dalam mengelola ketujuh sekolah tersebut adalah dengan pemberlakuan pola sentralisasi manajemen pembiayaan. Pola sentralisasi pembiayaan adalah pemusatan pengelolaan keuangan pada yayasan yaitu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang melalui Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

Majelis Dikdasmen saat ini membagi tujuh sekolah dasar dan menengah tersebut ke dalam tiga golongan. Tiga golongan tersebut adalah pertama golongan sekolah penerima subsidi, kedua golongan sekolah pemberi subsidi, dan terakhir golongan sekolah yang tidak menerima dan tidak memberi subsidi.

Menurut Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah sampai hari ini tersisa dua sekolah yang masih masuk dalam golongan sekolah penerima subsidi, yaitu SD Muhammadiyah 2 Kota Magelang dan SMA Muhammadiyah 2 Kota Magelang. Sedangkan golongan sekolah yang tidak menerima dan tidak memberi subsidi adalah MI Muhammadiyah Terpadu Kota Magelang dan SMP Muhammadiyah Kota Magelang, serta SD

Muhammadiyah 1 Alternatif, SMA Muhammadiyah 1 Kota Magelang, dan SMK Muhammadiyah Kota Magelang yang masuk ke dalam golongan sekolah pemberi subsidi. Jika dilihat dengan perbandingan status akreditasi, maka dapat digambarkan dengan tabel berikut.

	Akreditasi A	Akreditasi B
Penerima Subsidi	-	1. SD Muhammadiyah 2 Kota Magelang 2. SMA Muhammadiyah 2 Kota Magelang
Pemberi Subsidi	1. SD Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang 2. SMA Muhammadiyah 1 Kota Magelang	SMK Muhammadiyah Kota Magelang
Tidak menerima dan/atau tidak memberi subsidi	MI Muhammadiyah Terpadu Kota Magelang	SMP Muhammadiyah Kota Magelang

Sumber: diambil dari berbagai sumber

Tabel di atas memberikan gambaran persebaran status akreditasi sekolah dan golongan sekolah di Kota Magelang. Terlihat bahwa pada tingkat sekolah dasar yang memiliki persebaran lebih luas dibandingkan dengan tingkat menengah pertama maupun tingkat menengah atas. Terdapat tiga Sekolah Dasar di Kota Magelang yang masing-masing masuk ke dalam golongan yang berbeda. SD Muhammadiyah 1 Alternatif memiliki akreditasi A dan sejak awal tidak menerima subsidi. Berbeda dengan MI Muhammadiyah Terpadu Kota Magelang, meski memiliki akreditasi A namun sekolah ini sudah pernah menerima subsidi. Sedangkan SD Muhammadiyah 2 Kota Magelang saat ini masih terakreditasi B dan masih menerima subsidi.

SMA /SMK /Sederajat Muhammadiyah di Kota Magelang terdiri dari tiga sekolah, yaitu SMA Muhammadiyah 1 Kota Magelang, SMA

Muhammadiyah 2 Kota Magelang dan SMK Muhammadiyah Kota Magelang. SMA Muhammadiyah 1 Kota Magelang memiliki akreditasi A dan tidak menerima subsidi, SMA Muhammadiyah 2 Kota Magelang masih terakreditasi B dan menerima subsidi. Sedangkan SMK Muhammadiyah Kota Magelang terakreditasi B dan tidak menerima subsidi. SMP/Sederajat Muhammadiyah di Kota Magelang hanya terdapat satu yaitu SMP Muhammadiyah Kota Magelang. Saat ini SMP Muhammadiyah Kota Magelang terakreditasi B dan statusnya sudah pernah menerima subsidi.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai sentralisasi manajemen pembiayaan dan dampaknya di sekolah dasar binaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang. Hal ini disebabkan karena sekolah dasar lebih variatif disbanding dengan tingkatan lain, sehingga lebih bisa mewakili setiap dari status sekolah. Judul penelitian yang diajukan adalah Implementasi Sentralisasi Manajemen Pembiayaan Sekolah Dasar Muhammadiyah di Kota Magelang. Objek penelitian adalah sentralisasi manajemen pembiayaan dan dampaknya di sekolah-sekolah Muhammadiyah Kota Magelang. Adapun subjek penelitian adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang, Kepala dan bendaharawan sekolah.

Penelitian tentang manajemen pembiayaan ini dianggap sangat penting dan menarik untuk diteliti demi pengembangan mutu pendidikan dan memperkaya khasanah keilmuan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap sentralisasi manajemen pembiayaan Sekolah Dasar Muhammadiyah di Kota Magelang menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleng (2011) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Menurut Creswell (1988) studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok, budaya, ataupun suatu potret kehidupan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Oktober 2016 sampai dengan April 2017. Penelitian ini dilaksanakan di MI Muhammadiyah Terpadu Kota Magelang, SD Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang, dan SD Muhammadiyah 2 Kota Magelang.

Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah kepala dan bendahara tiga sekolah. Tiga sekolah tersebut yaitu 1) SD Muhammadiyah 1 Alternatif; 2) SD Muhammadiyah 2 Kota Magelang; dan 3) MI Muhammadiyah Terpadu Kota Magelang.

Prosedur

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara. Hasil wawancara kemudian akan ditriangulasikan dengan berbagai sumber.

Data, Instrumen, dan Teknik

Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi tentang manajemen pembiayaan dengan pola sentralisasi di Sekolah Dasar Muhammadiyah di Kota Magelang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Wawancara

Menurut Moloeng (2011: 186) "Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu". Kegiatan wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara. Digunakan metode wawancara terstruktur untuk bisa mendapatkan informasi secara mendetail dan menyeluruh terkait dengan manajemen pembiayaan dengan pola sentralisasi. Pihak

terwawancara dalam kegiatan wawancara ini adalah Kepala sekolah dan bendaharawan sekolah.

2. Observasi

Menurut Djaelani (2013) Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti, kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Proses yang dilakukan adalah wawancara dengan pihak kepala sekolah, pengelola keuangan sekolah, dan pihak yayasan. Selain wawancara, dilakukan juga proses observasi kondisi sekolah untuk memperkuat hasil wawancara. Disamping itu, data juga di peroleh dari dokumen APBS dan SPJ masing-masing sekolah. Data ini diperoleh dari sekolah dan dari yayasan untuk memperkuat data hasil wawancara.

3. Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2009: 240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa APBS dan surat dropping dana/pencairan dana. Studi dokumen ini dapat menguatkan data yang diperoleh dari metode wawancara maupun metode observasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang sentralisasi manajemen pembiayaan Sekolah Dasar Muhammadiyah di Kota Magelang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini berupa deskripsi tentang manajemen pembiayaan Sekolah Dasar Muhammadiyah di Kota Magelang dan dampak positif dan dampak negatifnya. Hasil penelitian dipaparkan sebagai berikut.

1. Implementasi Manajemen Pembiayaan Sekolah Dasar Muhammadiyah di Kota Magelang

Manajemen pembiayaan di Sekolah Dasar Muhammadiyah di Kota Magelang terdiri atas tiga kegiatan, yaitu penyusunan anggaran, pembukuan, dan pemeriksaan.

a. Penyusunan Anggaran

Kegiatan penyusunan anggaran menurut Nanang Fattah (2012) penyusunan anggaran merupakan sebuah rencana operasional yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk uang. Pengertian ini sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan baik di MI Muhammadiyah Terpadu Kota Magelang, SD Muhammadiyah 2 Kota Magelang, maupun SD Muhammadiyah Alternatif 1 Kota Magelang. Anggaran disusun dalam bentuk Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) yang berbentuk satuan uang. Selain itu APBS tersebut digunakan untuk pedoman dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Selain APBS, yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah surat pencairan dana yang digunakan untuk pedoman dalam kurun waktu satu bulan. surat pencairan dana ini menginduk pada APBS. Waktu penyusunan anggaran tidak ditentukan dalam satu waktu tertentu sehingga ditemukan perbedaan waktu penyusunan anggaran tiap sekolah. Waktu pelaksanaan penyusunan RAPBS di MI Muhammadiyah Terpadu Kota Magelang berbeda dengan yang dilaksanakan SD Muhammadiyah 2 Kota Magelang maupun SD Muhammadiyah Alternatif 1 Kota Magelang. MI Muhammadiyah Terpadu Kota Magelang melaksanakan penyusunan RAPBS pada bulan Juni-Juli sedangkan SD Muhammadiyah 2 Kota Magelang dan SD Muhammadiyah Alternatif 1 Kota Magelang melaksanakan penyusunan RAPBS pada bulan April.

Nanang Fattah (2012) menjabarkan beberapa prinsip dalam menyusun anggaran, salah satunya adalah adanya dukungan dari pelaksanaan mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. Hal ini ditemukan di lapangan berupa keterlibatan seluruh komponen sekolah dalam melaksanakan penyusunan anggaran.

Selain itu dukungan dari tingkat atas yaitu dari Majelis Dikdasmen. Dukungan tersebut dibuktikan dengan terlibatnya Majelis Dikdasmen dalam penyusunan anggaran di setiap sekolah.

Keterlibatan Majelis Dikdasmen adalah dengan cara memberikan persetujuan atas anggaran yang telah disusun oleh setiap sekolah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bendahara SD Muhammadiyah 2 Kota Magelang "PDM/Majelis nanti melakukan review dan memberikan persetujuan. Biasanya tidak satu kali langsung setuju, bisa 3 sampai 4 kali revisi. Kalau dari PDM/Majelis oke dari sekolah oke baru bisa disetujui".

b. Pembukuan

Kegiatan pembukuan menurut Jones (1985) pembukuan adalah proses klasifikasi, merekam, dan menghimpun transaksi keuangan dan mendeskripsikan transaksi keuangan lembaga. Data temuan di lapangan baik di MI Muhammadiyah Terpadu Kota Magelang, SD Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang, maupun SD Muhammadiyah 2 Kota Magelang menyatakan bahwa kegiatan pembukuan sejalan dengan pengertian milik Jones.

Adapun bentuk pembukuan berupa adanya buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mulyono. Mulyono (2010) menyatakan bahwa kegiatan pembukuan harus memiliki pengelompokan berupa buku pos, faktur, buku kas, lembar cek, jurnal, buku besar, buku kas pembayaran uang sekolah, buku kas piutang, dan neraca percobaan.

Selain itu, kegiatan pembukuan di sekolah juga dibantu oleh Majelis Dikdasmen. Bentuk bantuan dari Majelis Dikdasmen adalah berupa dibantunya sekolah dalam menyimpan uang yang dimiliki.

Setiap sekolah diharuskan menyerahkan pendapatannya kepada Majelis Dikdasmen. SD Muhammadiyah 2 Kota Magelang, SD Muhammadiyah Alternatif 1 Kota Magelang, maupun MI Muhammadiyah Terpadu Kota Magelang memiliki dua sumber pendapatan. Dua sumber pendapatan ini terdiri dari infaq siswa dan dana BOS. Kedua pendapatan ini diserahkan

terlebih dahulu kepada Majelis Dikdasmen sebelum dapat digunakan.

E. Mulyasa (2009) membagi kegiatan pembukuan menjadi dua kegiatan, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Maka berlakunya sistem sentralisasi menjadikan kegiatan penerimaan dan pengeluaran menjadi masing-masing dua tahap. Tahap penerimaan pertama adalah oleh masing-masing sekolah dan tahap penerimaan kedua adalah oleh Majelis Dikdasmen. Sedangkan tahap pengeluaran pertama adalah oleh Majelis Dikdasmen dan tahap pengeluaran kedua oleh masing-masing sekolah.

Kegiatan penerimaan oleh sekolah adalah berupa penerimaan uang infaq dari siswa ke masing-masing sekolah dan penerimaan dana BOS dari pemerintah kepada masing-masing sekolah. Sedangkan kegiatan penerimaan oleh Majelis Dikdasmen adalah kegiatan menerima pendapatan sekolah berupa uang infaq siswa dan dana BOS. Sekolah memiliki kewajiban menyerahkan pendapatan sekolahnya kepada Majelis Dikdasmen.

Kegiatan pengeluaran pertama dilakukan oleh Majelis Dikdasmen. Majelis Dikdasmen melakukan kegiatan pengeluaran setiap bulan. Kegiatan pengeluaran oleh Majelis Dikdasmen dilakukan dengan berpedoman pada surat pencairan dana yang dikirimkan oleh setiap sekolah. Sedangkan surat pencairan dana berpedoman pada APBS.

Kegiatan pengeluaran kedua dilakukan oleh setiap sekolah. Setiap sekolah melakukan kegiatan pengeluaran setelah melakukan pencairan dana. Kegiatan pencairan dana dilakukan setiap satu bulan sekali. Kegiatan pengeluaran ini dilakukan oleh sekolah untuk biaya operasional sekolah dan gaji guru serta karyawan.

Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Menurut E. Mulyasa (2007) otorisator adalah pihak yang memiliki

kewenangan untuk mengadakan kegiatan menerima dan mengeluarkan anggaran. Ordonator adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Sedangkan bendaharawan adalah pihak yang memiliki hak untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran serta memiliki kewajiban untuk membuat laporan. Berdasar pada pengertian ini maka pihak yang memiliki fungsi otorisator adalah Majelis Dikdasmen dan kepala di masing-masing sekolah. Hal ini dikarenakan Majelis Dikdasmen juga memiliki kewenangan dalam mengadakan kegiatan penerimaan dan pengeluaran di setiap sekolah. Sedangkan kepala sekolah juga memiliki kebijakan untuk mengadakan kegiatan penerimaan dan pengeluaran anggaran di sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah tersebut adalah Ibu Ismujiarti selaku Kepala MI Muhammadiyah Terpadu Kota Magelang, Bapak Hari Purwanto selaku Kepala SD Muhammadiyah 2 Kota Magelang, dan Bapak Mustaqim selaku Kepala SD Muhammadiyah Alternatif 1 Kota Magelang.

Adapun pihak yang memiliki fungsi ordonator adalah kepala sekolah, Majelis Dikdasmen, dan Dinas Pendidikan Kota Magelang/Kemenag Kota Magelang. Ketiga pihak ini dikatakan memiliki fungsi ordonator karena memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan.

Menurut Djamaluddin (1992) ada empat indikator kegiatan pembukuan yang efektif, yaitu mencegah penyalahgunaan uang yang menyimpang dari prosedur anggaran yang telah ditentukan, mencegah terjadinya pemborosan pembiayaan, mencegah defisit anggaran, dan melakukan pembuktian bahwa anggaran yang sudah digunakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada empat indikator di atas maka kegiatan pembukuan dalam sistem sentralisasi manajemen pembiayaan Sekolah Dasar Muhammadiyah di Kota Magelang dapat dikatakan efektif karena memenuhi empat indikator tersebut. Selain itu kontrol yang

dilakukan bukan hanya oleh sekolah tapi juga oleh Majelis Dikdasmen menyebabkan adanya pencegahan pemborosan pembiayaan yang dapat menimbulkan defisit anggaran.

c. Pemeriksaan

Menurut Suharsimi Arikunto (2008) Pemeriksaan adalah kegiatan pertanggungjawaban berupa seluruh kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang yang dilakukan oleh bendaharawan kepada pihak yang memiliki wewenang. Sesuai temuan di lapangan baik di MI Muhammadiyah Terpadu Kota Magelang, SD Muhammadiyah 2 Kota Magelang, dan SD Muhammadiyah Alternatif 1 Kota Magelang kegiatan pemeriksaan dilakukan oleh tiga pihak. Adapun ketiga pihak yang melakukan pemeriksaan adalah kepala sekolah, Majelis Dikdasmen, dan Dinas Pendidikan Kota Magelang/Kemenag Kota Magelang.

Pemeriksaan oleh Kepala Sekolah dilakukan terhadap sekolahnya masing-masing dan dilakukan secara rutin setiap bulan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh kepala sekolah mencakup seluruh sirkulasi pembiayaan yang ada di sekolah. Hal ini ditemukan baik di MI Muhammadiyah Terpadu Kota Magelang, SD Muhammadiyah 2 Kota Magelang maupun SD Muhammadiyah Alternatif 1 Kota Magelang.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Dikdasmen dilakukan kepada seluruh sekolah Muhammadiyah di Kota Magelang dengan melihat laporan pertanggungjawaban yang dikirim oleh masing-masing sekolah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk semua jenis pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh masing-masing sekolah. pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Dikdasmen setiap tiga bulan sekali.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Magelang/Kemenag Kota Magelang dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban yang dikirim oleh setiap sekolah. Bagi SD Muhammadiyah 2 Kota Magelang dan SD Muhammadiyah Alternatif 1 Kota Magelang laporan pertanggungjawaban

dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Magelang. Sedangkan MI Muhammadiyah Terpadu Kota Magelang mengirimkan laporan pertanggungjawaban kepada Kemenag Kota Magelang. Pemeriksaan ini dilakukan khusus untuk jenis pemasukan dan pengeluaran yang menggunakan dana BOS. Pemeriksaan oleh Dinas Pendidikan/Kemenag Kota Magelang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.

1. Dampak Positif dan Dampak Negatif Sentralisasi Manajemen Pembiayaan Sekolah Dasar Muhammadiyah Kota Magelang

Sentralisasi manajemen pembiayaan Sekolah Dasar Muhammadiyah di Kota Magelang merupakan pemusatan pengelolaan pembiayaan di tingkat yayasn. Yayasan adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Magelang melalui Majelis Dikdasmen. Tujuan dilaksanakannya sentralisasi manajemen pembiayaan sekolah adalah untuk menjalankan subsidi silang antar sekolah. guna memudahkan Majelis Dikdasmen dalam mengatur subsidi silang maka sekolah Muhammadiyah di Kota Magelang dibagi ke dalam tiga golongan. tiga golongan tersebut adalah pertama golongan sekolah penerima subsidi, golongan sekolah pemberi subsidi, dan golongan sekolah yang tidak menerima dan tidak memberi subsidi. Selama berjalannya sistem sentralisasi manajemen pembiayaan Sekolah Dasar Muhammadiyah di Kota Magelang tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Setiap sekolah memiliki tanggapan yang berbeda terkait dengan dampak yang dirasakan. Bila dipetakan menurut dampak yang dirasakan maka akan tampak seperti tabel berikut.

Tabel 2. Dampak Positif dan Negatif Sentralisasi Manajemen Pembiayaan

	Dampak Positif	Dampak Negatif
SD Muhammadiyah 2 Kota Magelang (penerima subsidi)	1. Mendapatkan subsidi operasional dari Majelis Dikdasmen	Beban kerja guru bertambah karena rangkap jabatan sebagai bendahara

	Dampak Positif	Dampak Negatif
SD Muhammadiyah Alternatif 1 Kota Magelang (Pemberi subsidi)	1. Ada transparansi dana	1. Tidak leluasa mengelola pembiayaan sekolah
MI Muhammadiyah Terpadu Kota Magelang (tidak menerima dan tidak memberi subsidi)	2. Terbantuan penyimpanan uang sekolah	2. Birokrasi rumit
	Mendapatkan dana talangan BOS	Birokrasi lama

Berdasarkan tabel di atas maka dapat lebih mudah ditinjau dampak yang muncul pada setiap golongan. Golongan sekolah penerima subsidi yaitu SD Muhammadiyah 2 kota Magelang merasakan dampak positif sebanyak dua poin sedangkan hanya merasakan dampak negatif satu poin. SD Muhammadiyah 2 Kota Magelang dapat dikatakan lebih banyak merasakan dampak positif.

Adapun golongan sekolah pemberi subsidi yaitu SD Muhammadiyah Alternatif 1 Kota Magelang merasakan dampak positif sebanyak dua poin sedangkan merasakan dampak positif sebanyak dua poin. SD Muhammadiyah Alternatif 1 Kota Magelang dapat dikatakan seimbang tidak terlalu berdampak positif maupun berdampak negatif.

Sedangkan golongan sekolah yang tidak menerima dan tidak mendapatkan subsidi yaitu MI Muhammadiyah Terpadu Kota Magelang merasakan dampak positif satu poin dan merasakan dampak negatif satu poin. Hal ini dapat dikatakan seimbang karena tidak condong pada dampak positif maupun dampak negatif.

Dapat disimpulkan bahwa berjalannya sistem sentralisasi manajemen pembiayaan Sekolah Dasar Muhammadiyah di Kota Magelang memiliki dampak positif lebih besar terutama bagi sekolah yang menerima subsidi. Selain itu tidak menimbulkan dampak yang merugikan baik bagi sekolah pemberi subsidi

maupun bagi sekolah yang tidak menerima maupun tidak memberikan subsidi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen pembiayaan di sekolah dasar Muhammadiyah di Kota Magelang memiliki tiga pokok kegiatan, yaitu penyusunan anggaran, pembukuan, dan pemeriksaan. Adapun penyusunan anggaran dilakukan oleh setiap sekolah dan dilakukan pada sekitar bulan April – Juni. Sedangkan pengesahan anggaran dilakukan oleh Majelis Dikdasmen. Oleh Majelis Dikdasmen sekolah Muhammadiyah di Kota Magelang dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan sekolah penerima subsidi, golongan sekolah pemberi subsidi, dan golongan sekolah tidak menerima dan tidak memberi subsidi. Seluruh sekolah diharuskan menyerahkan pendapatannya kepada Majelis Dikdasmen untuk dibantu pengelolaannya. Kemudian pada kegiatan pembukuan setiap sekolah dapat mengambil pendapatannya dengan mengikuti prosedur yang disebut pencairan dana. prosedur ini dilakukan dengan cara setiap sekolah mengirimkan surat pencairan dana kepada Majelis Dikdasmen yang berisikan rincian kebutuhan dan nominalnya. Kegiatan ini dilakukan setiap bulan. pencairan dana dilakukan dengan mengacu pada anggaran (APBS) yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu, kegiatan ketiga merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh tiga pihak, yaitu kepala sekolah, Majelis Dikdasmen, dan Dinas Pendidikan Kota Magelang/Kemenag Kota Magelang. Kepala sekolah dan Majelis Dikdasmen melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sirkulasi pembiayaan yang ada di setiap sekolah. sedangkan Dinas Pendidikan Kota Magelang/Kemenag Kota Magelang hanya melakukan pemeriksaan terhadap

sirkulasi pembiayaan yang bersumber dari dana BOS. Kepala sekolah melakukan pemeriksaannya setiap bulan, sedangkan Majelis Dikdasmen dan Dinas Pendidikan Kota Magelang/Kemenag Kota Magelang melakukan pemeriksaan setiap tiga bulan sekali.

2. Dampak positif dan dampak negatif sentralisasi manajemen pembiayaan sekolah dasar Muhammadiyah di Kota Magelang secara berimbang dirasakan oleh sekolah yang termasuk dalam golongan sekolah pemberi subsidi dan golongan sekolah yang tidak menerima dan tidak memberikan subsidi. Dampak negatif yang sama dirasakan oleh kedua golongan sekolah ini adalah rumitnya birokrasi yang ada sehingga proses pencairan dana bisa memakan waktu hingga 2-3 hari. Sedangkan dampak positif yang dirasa berbeda. Bagi sekolah golongan pemberi subsidi terbantu dengan adanya transparansi dana dalam pengelolaan pembiayaan di sekolah. Bagi sekolah golongan tidak menerima dan tidak memberikan subsidi merasa terbantu dengan adanya dana talangan yang disediakan. Sedangkan bagi sekolah dengan golongan penerima subsidi lebih besar dirasakan dampak positifnya, salah satunya yaitu adanya subsidi yang diberikan untuk biaya operasional sekolah.

Saran

Melihat keadaan di lapangan dan mencermati temuan dan analisis data, penyusun perlu menyampaikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan anggaran hendaknya Majelis Dikdasmen memberikan jadwal sehingga tidak ada perbedaan dari setiap sekolah saat mengumpulkan RAPBS.
2. Dalam proses pencairan dana hendaknya Majelis Dikdasmen mempermudah dan mempercepat prosesnya sehingga bagi setiap sekolah tidak terlalu lama menunggu.
3. Guna ikut membantu mempercepat kemajuan sekolah hendaknya Majelis Dikdasmen

memberikan pendampingan tidak hanya terbatas pada manajemen pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aunu Rofiq Djaelani. (2003). *Teknik 2. Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*. Semarang g: FPTK IKIP Veteran.
- Creswell, John W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. London: SAGE Publications.
- E. Mulyasa. (2007). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- _____. (2009). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Jones, H. Thomas. (1985). *Introduction to School Finance Technique and Social Policy*. New York: MacMillan Publishing Company.
- Lexy J. Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif rev.ed.*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Arief Djameluddin (2008). *Sistem Perencanaan Pembuatan Program dan Anggaran: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muljani A. Nurhadi. (2011). *Dilema Kebijakan Pendanaan Pendidikan*. Yogyakarta: Nurhadi Center.
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nanang Fattah. (2012). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (1988). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.